



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pandaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Pandaan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Pandaan dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Pandaan tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Pandaan dalam menyusun RKA Kecamatan Pandaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 160

BAB I

PENDAHULUAN

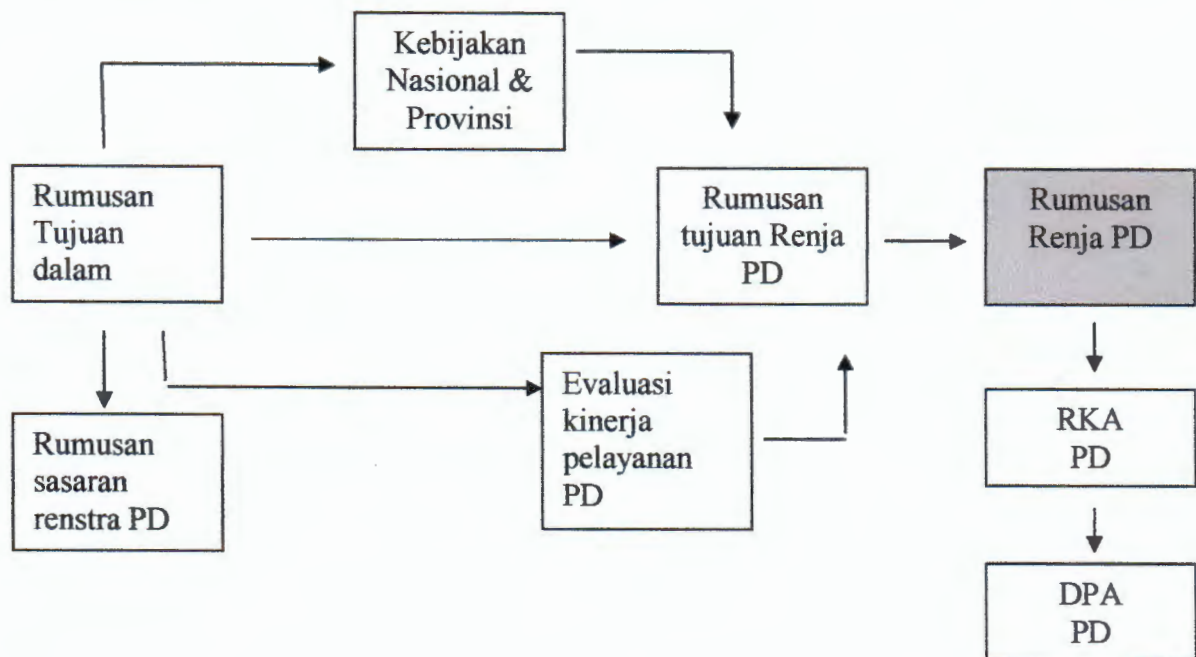
1.1. Latar Belakang

Renja Kecamatan Pandaan tahun 2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Pandaan. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Renja Kecamatan Pandaan proses penyusunannya adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Adapun bagan alur kedudukan Renja dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1

Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja perangkat daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Pandaan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Pandaan untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;

3. Renja Kecamatan Pandaan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Pandaan pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Pandaan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Pandaan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Pandaan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Pandaan dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Pandaan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pandaan pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pandaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Pandaan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pandaan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pandaan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Pandaan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pandaan;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Pandaan

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 323);
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Renstra Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pandaan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2024, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Pandaan dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pandaan adalah sebagai berikut:

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Pandaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Pandaan disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pandaan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pandaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pandaan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TAHUN 2019 DAN 2020										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	200 %	200 %					200 %	100
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang dibayar	96 rek	96 rek					96 rek	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	204 orang	204 orang					204 orang	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberi honor	60 orang	60 orang					60 orang	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis belanja ATK yang dibeli	16 jenis	68 jenis					68 jenis	425
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan	245 kali	248 kali					248 kali	101
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis belanja alat listrik yang dibeli	6 jenis	16 jenis					16 jenis	267
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis belanja perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	3 jenis	3 jenis					3 jenis	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan pelaksanaan mamin rapat	38 laporan	103 laporan					103 laporan	271
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	25 orang	65 orang					65 orang	260
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang diberi honor	264 orang	264 orang					264 orang	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	200 %	200 %					200 %	100
	Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun	0	- gedung					-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0	- unit					-	-
	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis pengadaan mebeular	2 jenis	2 jenis					2 jenis	100
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor	5 jenis	5 jenis					5 jenis	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	1 gedung	1 gedung					1 gedung	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang dilaksanakan	24 bulan	24 bulan					24 bulan	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang dilaksanakan	13 kali	20 kali					20 kali	154
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %					100 %	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	20 Pegawai	20 Pegawai					20 Pegawai	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	0 %	- %					- %	-
	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan yang disusun	0 laporan	- laporan					- laporan	-
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	Terlaksananya anggaran Dana Kelurahan	100 %	100 %					100 %	100
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	4 kali	4 kali					4 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	6 kali	7 kali					7 kali	117
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	6 kali	5 kali					5 kali	83
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petungasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	4 kali	4 kali					4 kali	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Petungasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Petungasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1 kali	- kali					- kali	-
	PROGRAM KORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %					100 %	100
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Manaqib yang dilaksanakan	10 kali	9 kali					9 kali	90
	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Terlaksananya fasilitasi	100 %	100 %					100 %	100
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUTKemerdekaan RI	1 kali	1 kali					1 kali	100
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian kasus kriminalitas	100 %	100 %					100 %	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 kali	4 kali					4 kali	100
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Meningkatnya koordinasi	100 %	100 %					100 %	100
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan pemberdayaan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali					1 kali	100
	TAHUN 2020									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN	Nilai IKM	86,75 skor	87 skor					87 skor	100
		Nilai SAKIP	60,6 nilai	71 nilai					71 nilai	117
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	6 kali					6 kali	120
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	6 kali					6 kali	120
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	6 kali					6 kali	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petungasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	6 kali					6 kali	120
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	- kali					- kali	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	- kali					- kali	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	- kali					- kali	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Petungasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	- kali					- kali	-
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	1 kali					1 kali	20
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	1 kali					1 kali	20
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	2 kali					2 kali	40
	Pemberdayaan Masyarakat Kel Petungasari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5 kali	1 kali					1 kali	20
	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan					1 laporan	100
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali	1 kali					1 kali	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN PANDAAN	Jumlah lembaga masyarakat yang terbina	18 Lembaga	18 Lembaga					18 Lembaga	100
		Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	80 %	80 %					80 %	100
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Manaqib yang dilaksanakan	4 kali	4 kali					4 kali	100
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali					1 kali	100
	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	100 %	100 %					100 %	100
	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	2 kali	2 kali					2 kali	100
	TAHUN 2021									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	84 %					84 %	84
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor	100 %	100 %					100 %	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	34 orang					34 orang	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 dokumen	16 dokumen					16 dokumen	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen					12 dokumen	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kantor	100 %	100 %					100 %	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket					6 Paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 pegawai	- pegawai					- pegawai	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana kantor	100 %	100 %					100 %	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket					10 Paket	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket					15 Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket					20 Paket	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					2 Paket	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	6 laporan					6 laporan	20
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %					100 %	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					2 Paket	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit					1 unit	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit					8 unit	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %					100 %	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49 laporan	49 laporan					49 laporan	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %					100 %	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit					2 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit					1 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	4 unit					4 unit	50
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	100 %	100 %					100 %	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	100 %	100 %					100 %	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan					1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen					6 dokumen	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari	4 dokumen	4 dokumen					4 dokumen	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan	4 dokumen	4 dokumen					4 dokumen	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	4 dokumen	4 dokumen					4 dokumen	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri	4 dokumen	4 dokumen					4 dokumen	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %	100 %					100 %	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	5 laporan					5 laporan	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	100 %	92 %					92 %	92
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100 %	100 %					100 %	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	3 laporan					3 laporan	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	100 %	85 %					85 %	85
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	2 unit					2 unit	40
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pandaan	jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun	3 unit	3 unit					3 unit	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Kutorejo	jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun	4 unit	4 unit					4 unit	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Petungasri	jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun	4 unit	4 unit					4 unit	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari	3 pokmas	2 pokmas					2 pokmas	67
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan	4 pokmas	4 pokmas					4 pokmas	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	1 pokmas	1 pokmas					1 pokmas	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Petungasri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasri	7 pokmas	5 pokmas					5 pokmas	71
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	100 %	100 %					100 %	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kecamatan	100 %	100 %					100 %	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan					4 Laporan	100
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan					5 Laporan	100
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Jogosari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Jogosari	2 Laporan	2 Laporan					2 Laporan	100
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Pandaan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Pandaan	2 Laporan	2 Laporan					2 Laporan	100
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Kutorejo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Kutorejo	2 Laporan	2 Laporan					2 Laporan	100
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Petungasri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Petungasri	2 Laporan	2 Laporan					2 Laporan	100
	TAHUN 2022 dan TAHUN 2023									
7	Urusan Kewilayahan									
7.01	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang		34 orang	31 orang	91,18	34 orang	65 orang	96

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00	16 dokumen	28 dokumen	100
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	24 dokumen	100
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawalan kantor	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	100,00	0 Paket	11 Paket	100
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 pegawai		31 pegawai	31 pegawai	100,00	0 pegawai	31 pegawai	100
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana kantor	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	2 Paket	100,00	10 Paket	12 Paket	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	15 Paket	16 Paket	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		2 Paket	2 Paket	100,00	20 Paket	22 Paket	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	100,00	2 Paket	4 Paket	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	12 dokumen	12 dokumen	100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	24 laporan	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00	30 laporan	42 laporan	100
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	200 %		100 %	87,50 %	87,50	100 %	187,5 %	94
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	0 Paket	0 Paket	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit		8 unit	7 unit	87,50	0 unit	7 unit	88
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	24 laporan	100
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit		4 unit	4 unit	100,00	4 unit	8 unit	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit		2 unit	2 unit	100,00	1 unit	3 unit	100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit		8 unit	8 unit	100,00	4 unit	12 unit	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	2 laporan	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %		100 %	100 %	100,00	0 %	100 %	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00	0 laporan	1 laporan	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan		2 laporan	2 laporan	100,00	2 laporan	4 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 unit		4 unit	4 unit	100,00	7 unit	11 unit	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pandaan	jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun	7 unit		3 unit	3 unit	100,00	4 unit	7 unit	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Kutorejo	jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun	10 unit		4 unit	4 unit	100,00	6 unit	10 unit	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Petungasri	jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun	8 unit		4 unit	4 unit	100,00	4 unit	8 unit	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari	2 pokmas		1 pokmas	1 pokmas	100,00	1 pokmas	2 pokmas	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan	2 pokmas		1 pokmas	1 pokmas	100,00	1 pokmas	2 pokmas	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	2 pokmas		1 pokmas	1 pokmas	100,00	1 pokmas	2 pokmas	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Petungasri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasri	2 pokmas		1 pokmas	1 pokmas	100,00	1 pokmas	2 pokmas	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	190 %		100 %	100 %	100,00	90 %	190 %	100
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kecamatan	200 %		100 %	100 %	100,00	100 %	200 %	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	1 Laporan	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Jogosari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Jogosari	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	1 Laporan	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Pandaan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Pandaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	1 Laporan	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Kutorejo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Kutorejo	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	1 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Petungasri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kel Petungasri	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	1 Laporan	100
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rasio jumlah kasus penegakan perda yang terfasilitasi sesuai dengan kewenangan kecamatan	100 %		100 %	100 %	100,00	0 %	100 %	100
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	1 Laporan	100

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Pandaan tahun 2022 adalah belanja pegawai sebesar Rp. 4.482.179.000,00 dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 4.190.088.368,00 atau 93,48%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.157.086,00 dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 2.036.287.176,00 atau 94,40%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 640.084.443,00 dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 628.884.251,00 atau 98,25%, belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp. 100.000.000,00 dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 99.765.000,00 atau sebesar 99,77%, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 1.524.237.914,00 dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.522.295.200,00 atau sebesar 99,87%. Keseluruhan Realisasi anggaran Kecamatan Pandaan dapat diuraikan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.	BELANJA DAERAH	8.903.587.977,-	8.477.319.995,-	95,21
5.1.	BELANJA OPERASI	6.639.265.620,-	6.226.375.544,-	93,78
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.482.179.000,-	4.190.088.368,-	93,48
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.157.086.620,-	2.036.287.176,-	94,40
5.2.	BELANJA MODAL	2.264.322.357,-	2.250.944.451,-	99,41
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	640.084.443,-	628.884.251,-	98,25
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,-	99.765.000,-	99,77
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.524.237.914,-	1.522.295.200,-	99,87

Realisasi anggaran Kecamatan Pandaan per sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.239.456.959,00	4.907.124.801,00	93,66%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.810.739.240,00	4.517.691.588,00	93,91%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.379.163.000,00	4.089.018.368,00	93,37%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	383.016.240,00	380.523.220,00	99,35%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.560.000,00	48.150.000,00	99,16%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.621.800,00	17.936.000,00	96,32%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.121.800,00	2.436.000,00	78,03%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.109.280,00	138.826.673,00	90,67%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.491.210,00	5.347.100,00	82,37%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.139.637,00	15.614.400,00	91,10%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.905.500,00	25.683.750,00	99,14%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.631.133,00	6.812.900,00	70,74%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.127.000,00	1.425.000,00	67,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.814.800,00	83.943.523,00	91,43%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	59.249.492,00	55.447.501,00	93,58%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.249.492,00	55.447.501,00	93,58%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.542.710,00	59.984.511,00	92,94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.542.710,00	59.984.511,00	92,94%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.194.437,00	117.238.528,00	88,02%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	112.293.100,00	101.863.728,00	90,71%

Jabatan			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.552.000,00	7.106.500,00	83,10%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.349.337,00	8.268.300,00	66,95%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.101.174.456,00	1.043.935.231,00	94,80%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.099.426.206,00	1.042.450.231,00	94,82%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.841.900,00	6.356.000,00	71,89%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.071.850,00	68.831.500,00	89,31%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari	307.579.645,00	301.567.837,00	98,05%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan	283.355.903,00	264.906.458,00	93,49%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	200.984.530,00	188.327.647,00	93,70%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri	221.592.378,00	212.460.789,00	95,88%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	1.748.250,00	1.485.000,00	84,94%

yang ada di Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.748.250,00	1.485.000,00	84,94%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.481.905.817,00	2.450.122.950,00	98,72%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.683.800,00	25.605.000,00	95,96%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.683.800,00	25.605.000,00	95,96%
Pemberdayaan Kelurahan	2.455.222.017,00	2.424.517.950,00	98,75%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Jogosari	481.761.227,00	481.761.200,00	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pandaan	488.439.605,00	487.450.000,00	99,80%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Kutorejo	466.216.264,00	465.450.000,00	99,84%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Petungasri	603.131.002,00	602.894.000,00	99,96%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Jogosari	107.489.948,00	88.483.000,00	82,32%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pandaan	123.349.098,00	116.121.200,00	94,14%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kutorejo	118.962.033,00	116.540.250,00	97,96%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Petungasri	65.872.840,00	65.818.300,00	99,92%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81.050.745,00	76.137.013,00	93,94%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.135.595,00	63.898.013,00	93,78%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	5.940.000,00	5.940.000,00	100,00%

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Jogosari)	10.396.180,00	7.816.963,00	75,19%
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Pandaan)	12.774.000,00	12.427.500,00	97,29%
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Kutorejo)	20.589.635,00	19.417.700,00	94,31%
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kelurahan Petungasri)	18.435.780,00	18.295.850,00	99,24%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.915.150,00	12.239.000,00	94,76%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.915.150,00	12.239.000,00	94,76%

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pandaan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;

- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.
- f. Perlu adanya peningkatan pemahaman pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, sehingga masih kesulitan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pandaan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat yang dapat dilihat dari pencapaian target indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator tujuan Kecamatan Pandaan yang masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM yang mendukung, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishment), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Pandaan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah:

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
 - a. Sekretaris
 - b. Subag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

CAMAT

Tugas pokok camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Camat:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi:

- a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum dan kepegawaian:

- Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;

- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor;
- Penghimpun data dan penyimpanan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji;
- Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas pokok sub bagian penyusunan program dan keuangan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun pembangunan;
- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program;
- Penyusunan dan pembuatan laporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan memiliki tugas pokok melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib memiliki tugas pokok melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib:

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi;

- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

LURAH

Merupakan perangkat Kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat

SEKRETARIS KELURAHAN

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dilingkungan kelurahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat diwilayah Kelurahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

SEKSI SOSIAL

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;

- c. menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat, lembaga adat, serta hak tradisionalnya yang hidup dan/atau tumbuh dalam masyarakat setempat; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Pandaan

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pandaan yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pandaan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pandaan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan:

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-2020)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman:

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	87.25	87.5	-	-	97,25	-	-	-	
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	90%	90%	-	-	100%	-	-	-	
5	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	75	76	-	-	75,73	-	-	-	
6	IKM Kecamatan	-	-	-	-	97,75	98,00	-	-	97,75	98,00	
7	Indeks penyelenggaraan kecamatan	-	-	-	-	90,00	92,00	-	-	90,00	92,00	
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	80,00	81,00	-	-	80,00	81,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana PD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Pandaan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Pandaan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<p>Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu di tingkatkan</p> <p>Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan</p> <p>Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu di tingkatkan</p>	Pelayanan Publik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja .

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Kecamatan Pandaan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pandaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (P2)	Kec. Pandaan	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	5.916.131.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (P2)	Kec. Pandaan	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	5.916.131.400	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Pandaan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	5.026.056.000	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Pandaan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	5.026.056.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Pandaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	4.554.486.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Pandaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	4.554.486.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	425.832.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	425.832.000	
5	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	45.738.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	45.738.000	
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pandaan	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100 %	65.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pandaan	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100 %	65.500.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31 paket	15.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31 paket	15.500.000	
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Pandaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Pandaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	50.000.000	
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pandaan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	185.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pandaan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	185.000.000	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	8.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	8.500.000	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	12.000.000	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	25.000.000	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000.000	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	4.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	4.500.000	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	120.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pandaan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	100 %	387.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pandaan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	100 %	387.000.000	
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pandaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	1 unit	160.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pandaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	1 unit	160.000.000	
19	Pengadaan Mebel	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	127.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Pandaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	127.000.000	
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	100.000.000	
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pandaan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100 %	85.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pandaan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100 %	85.600.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	85.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	85.600.000	
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pandaan	Prosentase BMD Kondisi baik	80 %	166.975.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pandaan	Prosentase BMD Kondisi baik	80 %	166.975.400	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pandaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	104.098.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pandaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	104.098.900	
26	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	
27	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	12.876.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	12.876.500	
29	PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pandaan	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	1.023.921.900	PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pandaan	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	1.023.921.900	
30		Kec. Pandaan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,5 nilai			Kec. Pandaan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,5 nilai		
31	Kegiatan Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pandaan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 %	1.013.921.900	Kegiatan Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pandaan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 %	1.013.921.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	13.921.900	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	13.921.900	
33	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Jogosari	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Jogosari	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	
34	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Kutorejo	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Kutorejo	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	
35	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Pandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Pandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	
36	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Petungasri	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Petungasri	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	250.000.000	
37	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Pandaan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	100 %	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Pandaan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	100 %	10.000.000	
38	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sarana prasarana PATEN)	1 laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sarana prasarana PATEN)	1 laporan	10.000.000	
39	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pandaan	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	70 %	3.865.000.000	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pandaan	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	70 %	3.865.000.000	
40		Kec. Pandaan	2. Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	20 %			Kec. Pandaan	2. Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	20 %		
41	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pandaan	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	70 %	165.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pandaan	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	70 %	165.000.000	
42	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pandaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	90 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pandaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	90 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	
43	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	160.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	160.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
44	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pandaan	Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	20 %	3.600.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pandaan	Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	20 %	3.600.000.000	
45		Kec. Pandaan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	50 %			Kec. Pandaan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	50 %		
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	
48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	
49	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petungasri	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petungasri	Kec. Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	750.000.000	
50	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	
51	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	
52	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	
53	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasri	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasri	Kec. Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	150.000.000	
54	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pandaan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 keluarga	100.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pandaan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 keluarga	100.000.000	
55	Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Pandaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	100.000.000	Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Pandaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	100.000.000	
56	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pandaan	Persentase penanganan gangguan trantibum	100 %	12.243.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pandaan	Persentase penanganan gangguan trantibum	100 %	12.243.000	
57	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum Presentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	12 laporan	12.243.000	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum Presentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	12 laporan	12.243.000	
58	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	6.243.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	6.243.000	

No	Rancangan Awal RHPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	6.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pandaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	6.000.000	
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pandaan	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100 %	206.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pandaan	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100 %	206.000.000	
61	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pandaan	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	200 orang	206.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pandaan	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	200 orang	206.000.000	
62	Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Pandaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	206.000.000	Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Pandaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	206.000.000	
63	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pandaan	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	80 %	65.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pandaan	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	80 %	65.000.000	
64	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pandaan	Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	80 %	65.000.000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pandaan	Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	80 %	65.000.000	
65	Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 dokumen	60.000.000	Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 dokumen	60.000.000	
66	Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 dokumen	5.000.000	Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pandaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 dokumen	5.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Pandaan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses buttom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Pandaan saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan Kecamatan Pandaan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasiliasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Pandaan dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pandaan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pandaan telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum

4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi/ LSM/masyarakat umum
---	--	--	---------------------------------

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan strategisnya, maka tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Tujuan strategis yang dicapai Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikatornya adalah nilai IKM.

Sasaran strategis Kecamatan Pandaan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan serta merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga dapat di capai.

Adapun korelasi antara tujuan, Sasaran dan strategi Kecamatan Pandaan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan
		Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Pandaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan :
- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan :
- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan :
- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan di atas merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap PD wajib melakukan pemetaan progam dan kegiatan menurut kodifikasi, Nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dilampiri dengan tabel pemetaan serta Lampiran KUAPPAS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pandaan Tahun 2024 berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan

	PUBLIK		Instansi Vertikal Terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

	PEMERINTAHAN UMUM	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pandaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi		100 %	Rp 5.916.131.400			100 %	Rp 6.507.744.540
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100 %	Rp 5.026.056.000			100 %	Rp 5.528.661.600
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pandaan	34 orang/ bulan	Rp 4.554.486.000	DAU		34 orang/ bulan	Rp 5.009.934.600
					Belanja operasi : Rp 4.554.486.000				
					Belanja pegawai : Rp 4.554.486.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pandaan	12 dokumen	Rp 425.832.000	DAU		12 dokumen	Rp 468.415.200
					Belanja operasi : Rp 425.832.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 425.832.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pandaan	12 dokumen	Rp 45.738.000	DAU		12 dokumen	Rp 50.311.800
					Belanja operasi : Rp 45.738.000				
					Belanja pegawai : Rp 45.738.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100 %	Rp 65.500.000			100 %	Rp 72.050.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Pandaan	31 paket	Rp 15.500.000	DAU		31 paket	Rp 17.050.000
					Belanja operasi : Rp 15.500.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 15.500.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Pandaan	31 pegawai	Rp 50.000.000	DAU		31 pegawai	Rp 55.000.000
					Belanja operasi : Rp 50.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 50.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100 %	Rp 185.000.000			100 %	Rp 203.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pandaan	2 paket	Rp 8.500.000	DAU		2 paket	Rp 9.350.000
					Belanja operasi : Rp 8.500.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 8.500.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pandaan	2 paket	Rp 12.000.000	DAU		2 paket	Rp 13.200.000
					Belanja operasi : Rp 12.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 12.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pandaan	2 paket	Rp 25.000.000	DAU		2 paket	Rp 27.500.000
					Belanja operasi : Rp 25.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 25.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja hibah : Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	-			
					Belanja modal	-			
					Belanja tidak terduga	-			
					Belanja transfer	-			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kec. Pandaan	2 paket	Rp 10.000.000	DAU		2 paket	Rp 11.000.000
					Belanja operasi	Rp 10.000.000			
					Belanja pegawai	-			
					Belanja barang dan jasa	Rp 10.000.000			
					Belanja bunga	-			
					Belanja subsidi	-			
					Belanja hibah	-			
					Belanja bantuan sosial	-			
					Belanja modal	-			
					Belanja tidak terduga	-			
					Belanja transfer	-			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kec. Pandaan	3 dokumen	Rp 4.500.000	DAU		3 dokumen	Rp 4.950.000
					Belanja operasi	Rp 4.500.000			
					Belanja pegawai	-			
					Belanja barang dan jasa	Rp 4.500.000			
					Belanja bunga	-			
					Belanja subsidi	-			
					Belanja hibah	-			
					Belanja bantuan sosial	-			
					Belanja modal	-			
					Belanja tidak terduga	-			
					Belanja transfer	-			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pandaan	12 laporan	Rp 5.000.000	DAU		12 laporan	Rp 5.500.000
					Belanja operasi	Rp 5.000.000			
					Belanja pegawai	-			
					Belanja barang dan jasa	Rp 5.000.000			
					Belanja bunga	-			
					Belanja subsidi	-			
					Belanja hibah	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pandaan	12 laporan	Rp 120.000.000	DAU		12 laporan	Rp 132.000.000
					Belanja operasi : Rp 120.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 120.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100 %	Rp 387.000.000			100 %	Rp 425.700.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	Kec. Pandaan	1 unit	Rp 160.000.000	DAU		1 unit	Rp 176.000.000
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 160.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Pandaan	1 paket	Rp 127.000.000	DAU		1 paket	Rp 139.700.000
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 127.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pandaan	0 unit	Rp -	DAU		0 unit	Rp -
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pandaan	4 unit	Rp 100.000.000	DAU		4 unit	Rp 110.000.000
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 100.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100 %	Rp 85.600.000			100 %	Rp 94.160.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pandaan	12 laporan	Rp 85.600.000	DAU		12 laporan	Rp 94.160.000
					Belanja operasi : Rp 85.600.000				
					Belanja pegawai : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja barang dan jasa : Rp 85.600.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase BMD Kondisi baik		80 %	Rp 166.975.400			80 %	Rp 183.672.940
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Pandaan	4 unit	Rp 104.098.900	DAU		4 unit	Rp 114.508.790
					Belanja operasi : Rp 104.098.900				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 104.098.900				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Pandaan	1 unit	Rp 50.000.000	DAU		1 unit	Rp 55.000.000
					Belanja operasi : Rp 50.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 50.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Pandaan	10 unit	Rp 12.876.500	DAU		10 unit	Rp 14.164.150
					Belanja operasi : Rp 12.876.500				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 12.876.500				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Urusan								
	Bidang ...								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu		100 %	Rp 1.023.921.900			100 %	Rp 1.126.314.090
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		3,5 nilai				3,5 nilai	
7.01.02.2.01.	Kegiatan Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait		100 %	Rp 1.013.921.900			100 %	Rp 1.115.314.090
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koord./ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pandaan	1 laporan	Rp 13.921.900	DAU		1 laporan	Rp 15.314.090
					Belanja operasi : Rp 13.921.900				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 13.921.900				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Jogosari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pandaan	1 dokumen	Rp 250.000.000	DAU		1 dokumen	Rp 275.000.000
					Belanja operasi : Rp 200.000.000				
					Belanja pegawai : Rp 23.760.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp 176.240.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 50.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Kutorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pandaan	1 dokumen	Rp 250.000.000	DAU		1 dokumen	Rp 275.000.000
					Belanja operasi : Rp 200.000.000				
					Belanja pegawai : Rp 23.760.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp 176.240.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 50.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pandaan	1 dokumen	Rp 250.000.000	DAU		1 dokumen	Rp 275.000.000
					Belanja operasi : Rp 200.000.000				
					Belanja pegawai : Rp 23.760.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp 176.240.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja modal : Rp 50.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Petungasri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pandaan	1 dokumen	Rp 250.000.000	DAU		1 dokumen	Rp 275.000.000
					Belanja operasi : Rp 200.000.000				
					Belanja pegawai : Rp 23.760.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp 176.240.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 50.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)		100 %	Rp 10.000.000			100 %	Rp 11.000.000
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sarana prasarana PATEN)	Kec. Pandaan	1 laporan	Rp 10.000.000	DAU		1 laporan	Rp 11.000.000
					Belanja operasi : Rp 10.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif		70 %	Rp 3.865.000.000			70 %	Rp 4.251.500.000
		2. Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif		20 %				20 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti		70 %	Rp 165.000.000			70 %	Rp 181.500.000
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pandaan	90 lembaga kemasyarakatan	Rp 5.000.000	DAU		90 lembaga kemasyarakatan	Rp 5.500.000
					Belanja operasi : Rp 5.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pandaan	3 laporan	Rp 160.000.000	DAU		3 laporan	Rp 176.000.000
					Belanja operasi : Rp 160.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 160.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan		20 %	Rp 3.600.000.000			20 %	Rp 3.960.000.000
		Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi		50 %				50 %	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Pandaan	5 unit	Rp 750.000.000	DAU		5 unit	Rp 825.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 750.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Pandaan	5 unit	Rp 750.000.000	DAU		5 unit	Rp 825.000.000
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 750.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Pandaan	5 unit	Rp 750.000.000	DAU		5 unit	Rp 825.000.000
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 750.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petungasri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Pandaan	5 unit	Rp 750.000.000	DAU		5 unit	Rp 825.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 750.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pandaan	1 pokmas	Rp 150.000.000	DAU		1 pokmas	Rp 165.000.000
					Belanja operasi : Rp 150.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 150.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pandaan	1 pokmas	Rp 150.000.000	DAU		1 pokmas	Rp 165.000.000
					Belanja operasi : Rp 150.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 150.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pandaan	1 pokmas	Rp 150.000.000	DAU		1 pokmas	Rp 165.000.000
					Belanja operasi : Rp 150.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 150.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Pandaan	1 pokmas	Rp 150.000.000	DAU		1 pokmas	Rp 165.000.000
					Belanja operasi : Rp 150.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 150.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		100 keluarga	Rp 100.000.000			100 keluarga	Rp 110.000.000
	Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Pandaan	100 keluarga	Rp 100.000.000	DAU		100 keluarga	Rp 110.000.000
					Belanja operasi : Rp 100.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja barang dan jasa : Rp 100.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase penanganan gangguan trantibum		100 %	Rp 12.243.000			100 %	Rp 13.467.300
7.01.04.2.01.	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum Presentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait		12 laporan	Rp 12.243.000			12 laporan	Rp 13.467.300
7.01.04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kec. Pandaan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>Rp 6.243.000</i>	<i>DAU</i>		<i>2 laporan</i>	<i>Rp 6.867.300</i>
					Belanja operasi : Rp 6.243.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 6.243.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.04.2.01.02	<i>Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Kec. Pandaan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>Rp 6.000.000</i>	<i>DAU</i>		<i>2 laporan</i>	<i>Rp 6.600.000</i>
					Belanja operasi : Rp 6.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 6.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan		100 %	Rp 206.000.000			100 %	Rp 226.600.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		200 orang	Rp 206.000.000			200 orang	Rp 226.600.000
	Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Pandaan	200 orang	Rp 206.000.000	DAU		200 orang	Rp 226.600.000
					Belanja operasi : Rp 206.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 206.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik		80 %	Rp 65.000.000			80 %	Rp 71.500.000
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti		80 %	Rp 65.000.000			80 %	Rp 71.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pandaan	36 dokumen	Rp 60.000.000	DAU		36 dokumen	Rp 66.000.000
					Belanja operasi : Rp 60.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 60.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Sub kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pandaan	18 dokumen	Rp 5.000.000	DAU		18 dokumen	Rp 5.500.000
					Belanja operasi : Rp 5.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
					Total Belanja operasi : Rp 7.501.296.300				
					Belanja pegawai : Rp 4.695.264.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp 2.806.032.300				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan : Rp -				
					Total Belanja modal : Rp 3.587.000.000				
					Total Belanja tidak terduga : Rp -				
					Total Belanja transfer : Rp -				
					Total Belanja PD : Rp 11.088.296.300				

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pandaan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pandaan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Pandaan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari

rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan program – program yang dijalankan bisa tepat sasaran, optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Pandaan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF